BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1. Tinjauan Pustaka

2.1.1. Kemiskinan

2.1.1.1. Definisi kemiskinan

Menurut Niemietz (2011) dalam Maipita (2014), kemiskinan adalah ketidak mampuan untuk membeli barang-barang kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, papan, dan obat-obatan. Menurut Kuncoro (2000) dalam Tyas (2016) kemiskinan adalah ketidak mampuan untuk memenuhi standar hidup minimum. Sedangkan Badan Pusat Statistik (2016) mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidak mampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar antara lain: (1) terpenuhinya kebutuhan pangan; (2) kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam dan lingkungan; (3) rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan; (4) hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik.

Hamid (2008) menyebutkan bahwa saat ini pengertian kemiskinan bukan hanya didasarkan pada aspek pendapatan dan konsumsi saja, namun mencakup aspek ketergantungan, harga diri, pendapatan, kesejahteraan dan sebagainya. Menurut SMERU Research Institute, kemiskinan didefinisikan dengan melihat berbagai dimensi yaitu:

- Ketidak mampuan dalam mencukupi kebutuhan pokok (sandang, pangan dan papan).
- 2) Tidak mempunyai akses terhadap kebutuhan dasar lainnya seperti kesehatan, pendidikan, sanitasi, air bersih, dan transportasi.
- Tidak mempunyai jaminan atas masa depan yang disebabkan tidak adanya investasi pendidikan dan keluarga.
- 4) Rentan terhadap masalah yang bersifat individual maupun massal
- Mempunyai kualitas sumber daya manusia yang rendah dan sumber daya alam yang terbatas.
- 6) Tidak pernah ikut dalam kegiatan sosial di masyarakat
- Tidak mempunyai akses terhadap kesempatan kerja dan pekerjaan yang mapan
- 8) Tidak mampu berusaha karena mempunyai kelainan fisik maupun mental
- 9) Ketidakmampuan sosial seperti anak-anak terlantar, wanita korban kekerasan rumah tangga, janda miskin, kelompok minoritas dan terpencil.

Dari berbagai definisi telah di sebutkan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kemiskinan adalah suatu kondisi dimana seseorang tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

2.1.1.2. Teori Kemiskinan

1. Teori Lingkaran Setan Kemiskinan

Nurkse mengutarakan pemikirannya dalam teori lingkaran setan kemiskinan (*Vicius Circle of Poverty*). Terjadinya kemiskinan disebabkan karena keterbelakangan manusia dan sumber daya alam. Pengelolaan sumber daya alam sangat bergantung pada kemampuan produktif manusia. Jika penduduknya banyak yang miskin dan pendidikannya rendah, maka akan mengakibatkan kelangkaan keterampilan teknik, pengetahuan, dan aktivitas kewiraswastaan yang secara otomatis akan menyebabkan sumber daya alam yang tersedia terbengkalai, tidak berkembang, dan bahkan salah guna. Di sisi lain, kurangnya sumber daya alam akan menyebabkan kemiskinan, karena sumber daya alam adalah sumber utama kebutuhan dalam kehidupan manusia. Kemiskinan sumber daya alam merupakan sebab dan sekaligus akibat kemiskinan manusia.

2. Teori Arthur Lewis

Arthur Lewis mengatakan bahwasanya tingkat pertumbuhan ekonomi akan diikuti oleh aliran vertikal dari penduduk kaya ke penduduk miskin yang terjadi dengan sendirinya. Manfaat pertumbuhan ekoonomi akan dirasakan penduduk kaya terlebih dahulu, dan kemudian pada tahap selanjutnya penduduk miskin mulai memperoleh manfaat ketika penduduk kaya mulai membelanjakan hasil

dari pertumbuhan ekonomi yang telah diterimanya. Hal ini berarti bahwa kemiskinan akan berkurang dalam skala yang sangat kecil apabila penduduk miskin hanya menerima sedikit manfaat dari total manfaat yang ditimbulkan dari adanya pertumbuhan ekonomi

3. Teori Marjinal

Teori ini berasumsi bahwa setiap wilayah pasti mempunyai masyarakat dengan tingkat kehidupan rendah atau hidup miskin. Oscar Lewis (1966) adalah tokoh dari aliran teori Marjinal. Konsepnya yang terkenal adalah *Culture of Poverty*. Menurut Lewis, setiap masyarakat di dunia menjadi miskin disebabkan adanya budaya hidup rendah seolah-olah tidak perduli dengan kemajuan zaman, sehingga ingin hidup dengan semaunya sendiri tanpa ada perasaan untuk hidup jauh lebih baik, pasrah dengan keadaan, kurang pendidikan dan pengetahuan, kurang ambisi dalam membangun masa depan, kejahatan dan kekerasan yang banyak terjadi.

4. Teori Pembangunan

Teori ini menyebutkan bahwa akar permasalahan kemiskinan adalah persoalan perekonomian dan masyarakat sebagai satu kesatuan. Asumsi dari teori ini adalah:

- a) Negara menjadi miskin karena ketiadaan atribut industrialisasi, modal, kemampuan manajerial, dan prasarana yang diperlukan untuk peningkatan ekonomi.
- b) Pertumbuhan ekonomi adalah kriteria utama pembangunan yang dianggap dapat mengatasi masalah-masalah ketimpangan.

 Kemiskinan akan hilang dengan sendirinya bila pasar diperluas sebesarbesarnya dan pertumbuhan ekonomi didorong setinggi-tingginya.

2.1.1.3. Faktor Penyebab Kemiskinan

Menurut Spicker, penyebab kemiskinan dibagi menjadi dalam 4 mazhab, yaitu:

- 1) Individual Explanation: Mazhab ini berpendapat bahwa kemiskinan disebabkan oleh karakteristik orang miskin itu sendiri. Karakteristik yang dimaksud misalnya malas dan kurang sungguh-sungguh dalam segala hal, termasuk dalam bekerja. Mereka juga sering salah dalam memilih, termasuk dalam memilih sekolah, memilih pekerjaan, jalan hidup, tempat tinggal, dan lainnya.
- 2) Familiar Explanation: Mazhab ini berpendapat bahwa kemiskinan cenderung disebabkan oleh faktor keturunan. Dalam hal ini misalnya tingkat pendidikan orang tua yangrendahtelah membawa ke dalam kemiskinan karena kurangnya skill yang dimiliki untuk bekerja ditempat yang layak. Akibatnya, sang orang tua juga tidak mampu memberikan pendidikan yang layak kepada anaknya sehingga pada akhirnya si anak juga jatuh kepada kemiskinan.
- 3) Subcultural Explanation: Mazhab ini berpendapat bahwa kemiskinan disebabkan oleh kultur, kebiasaan, adat-istiadat, atau akibat karakteristik perilaku lingkungan. Misalnya, kebiasaan yang bekerja adalah kaum perempuan, kebiasaan yang enggan untuk bekerja keras dan menerima apa adanya, keyakinan bahwa mengabdi kepada para raja atau orang

terhormat meski tidak diberi bayaran dan lainnya yang berakibat pada kemiskinan. Terkadang orang seperti ini justru tidak merasa miskin karena sudah terbiasa dan memang kulturnya yang sudah demikian.

4) Structural Explanation: Mazhab ini berpendapat bahwa kemiskinan timbul akibat dari ketidak seimbangan, perbedaan status yang dibuat oleh adat istiadat, kebijakan, dan aturan lain menimbulkan perbedaan hak untuk bekerja, sekolah dan lainnya hingga menimbulkan kemiskinan di antara mereka yang statusnya rendah dan haknya terbatas.

Penyebab kemiskinan menurut dipandang dari sisi ekonomi menurut Sharp, et.al (1996) dalam Kuncoro (2006) :

- Adanya ketidak samaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang
- 2) Perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia.
- 3) Perbedaan akses dalam modal.

Ketiga penyebab kemiskinan menurut Sharp tersebut berporos pada teori lingkaran setan kemiskinan (*Vicious circle of poverty*) menurut Nurkse (Kuncoro, 2006)

Todaro dan Smith (2008) menyebutkan bahwa kemiskinan disebabkan karena interaksi dari faktor-faktor berikut ini:

- Tingkat pendapatan nasional negara terbilang rendah dan laju pertumbuhan ekonominya berjalan lambat.
- Pendapatan perkapita rendah dan pertumbuhannya sangat lambat atau bahkan stagnasi.

- 3) Terjadi ketimpangan distribusi pendapatan.
- 4) Mayoritas penduduk hidup di bawah tekanan kemiskinan absolut.
- 5) Fasilitas dan pelayanan kesehatan buruk dan sangat terbatas, kekurangan gizi.
- 6) Fasilitas pendidikan dan kurikulum kurang memadai.

Suroso (2006) menyebutkan kemiskinan yang terjadi di negara miskin disebabkan oleh faktor-faktor berikut:

- 1) Ketidaksempurnaan pasar,
- 2) Keterbelakangan,
- 3) Ketertinggalan
- 4) Kekurangan modal
- 5) Produktivitas rendah
- 6) Tabungan rendah
- 7) Pendapatan rendah
- 8) Investasi rendah

2.1.1.4. Jenis-jenis kemiskinan

Menurut BPS, kemiskinan pada dasarnya bisa dilihat dari dua sisi, yaitu:

1) Kemiskinan Absolut. Kemiskinan absolut adalah kemiskinan yang berkaitan dengan tingkat pendapatan dan kebutuhan yang terbatas pada kebutuhan pokok sehingga orang tersebut dapat disebut hidup dengan layak. Kemiskinan absolut diukur dengan membandingkan tingkat pendapatan seseorang dengan tingkat pendapatan yang diperlukan untuk mendapatkan kebutuhan dasarnya tersebut dengan tujuan kelangsungan

hidupnya. Dengan demikian, seseorang dikatakan miskin absolut apabila pendapatan yang diperolehnya kurang dari garis kemiskinan dan tidak mampu mencukupi kebutuhan pokoknya.

2) Kemiskinan Relatif. Kemiskinan relatif dilihat dari aspek ketimpangan sosial. Apabila seseorang sudah mampu memenuhi kebutuhan dasar minimumnya, namun masih jauh lebih rendah bila dibandingkan dengan masyarakat di sekitarnya, maka orang tersebut termasuk kategori miskin relatif. Semakin tinggi kesenjangan tingkat pendapatan antara golongan atas dengan golongan bawah maka akan semakin 17 tinggi pula jumlah penduduk miskin. Dengan demikian, kemiskinan relatif berhubungan erat dengan distribusi pendapatan.

Sastra Atmadja (2007) menyebutkan bahwa kemiskinan dapat dibedakan menjadi empat, yaitu:

- Persistent proverty, yaitu kemiskinan yang telah kronis atau turun temurun
- Cyclical poverty, yaitu kemiskinan yang mengikuti pola siklus ekonomi secara keseluruhan
- Seasonal poverty, yaitu kemiskinan musiman yang sering ditemui pada kasus nelayan dan pertanian.
- 4) Accident poverty, yaitu kemiskinan yang tercipta karena adanya bencana alam, konflik dan kekerasan atau akibat dari suatu kebijakan yang menyebabkan menurunnya tingkat kesejahteraan suatu masyarakat.

2.1.2. Rata-rata lama sekolah

2.1.2.1. Definisi Rata-rata Lama Sekolah

Menurut Tobing dalam Hastarini dan Dwi (2005), berpendapat bahwa seseorang yang pendidikannya tinggi yang diukur dengan lamanya waktu bersekolah akan memiliki pekerjaan dan upah yang lebih baik dibandingkan dengan orang yang pendidikannya lebih rendah. Menurut Todaro (2000), tingkat penghasilan sangat dipengaruhi oleh lamanya seseorang memperoleh pendidikan. Rata-rata lama sekolah merupakan indikator tingkat pendidikan di suatu daerah. Pendidikan merupakan salah satu bentuk modal manusia (*human capital*) yang menunjukkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Pendidikan merupakan bentuk investasi individu, di mana jika semakin tinggi pendidikan, maka kesejahteraan suatu individu akan meningkat dan hal ini juga akan mempengaruhi jangka panjang kesejahteraan ekonomi suatu negara (Mankiw, 2012). Dalam aspek pendidikan indikator yang berpengaruh terhadap kemiskinan di suatu daerah ditentukan dari rata-rata lama sekolah

Rata-rata lama sekolah mengindikasikan makin tingginya pendidikan formal yang dicapai oleh masyarakat suatu daerah. Semakin tinggi rata-rata lama sekolah berarti semakin tinggi jenjang pendidikan yang dijalani. Rata-rata lama sekolah yaitu rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas di seluruh jenjang pendidikan formal yang diikuti. Rata-rata lama sekolah dapat dirumuskan:

$$RLS = \frac{1}{n} \times \sum_{i=1}^{n} x_i$$

Dimana:

RLS = Rata-rata lama sekolah penduduk berusia 25 tahun ke atas

X_i = Lama sekolah penduduk ke-i yang berusia 25 tahun ke atas

n = Jumlah penduduk berusia 25 tahun ke atas

2.1.2.2. Teori Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah yang merupakan salah satu indikator pendidikan, tidak dapat terlepas dari masalah ekonomi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Berbagai kajian akademis dan penelitian empiris telah membuktikan keabsahannya. Alhumami (2004), menyatakan pendidikan bukan hanya melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas, memiliki pengetahuan dan keterampilan, serta menguasai teknologi, melainkan juga dapat menumbuhkan iklim bisnis yang sehat dan kondusif bagi pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut mendorong setiap warga negara untuk mandiri berwirausaha secara adil dan sehat. Kata lainnya, turut serta memberikan kontribusi aktif dalam pembangunan, melalui produktivitasnya dapat meningkatkan pendapatan serta akhirnya mendongkrak pertumbuhan ekonomi.

Menurut Hanushek dan Wossman (2018) terdapat tiga mekanisme teori pertumbuhan ekonomi dimana pendidikan dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Pertama, pendidikan dapat meningkatkan modal manusia yang melekat pada angkatan kerja sehingga meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Dengan demikian transmisi pertumbuhan ekonomi mengarah pada tingkat

output ekuilibrium yang lebih tinggi, sebagaimana dalam teori pertumbuhan neoklasik oleh Mankiw, Romer, & Weil, (1992). Kedua, pendidikan dapat meningkatkan meningkatkan kapasitas inovatif ekonomi dan perkembangan teknologi, yang mendorong pertumbuhan ekonomi, seperti dalam teori pertumbuhan endogen oleh Lucas (1988) & Romer (1990). Selanjutnya, pendidikan memfasilitasi difusi dan transmisi pengetahuan yang diperlukan untuk memahami dan memproses informasi baru dan menerapkan teknologi baru yang berhasil yang dirancang oleh orang lain, yang juga mendorong pertumbuhan ekonomi seperti Nelson & Phelps (1966) dan Benhabib & Spiegel, (1994).

2.1.3. Pengangguran

2.1.3.1. Definisi dan Teori Pengangguran

Pengangguran adalah seorang penduduk yang berada pada golongan angkatan kerja yang belum memiliki pekerjaan dan secara aktif mencari pekerjaan. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) dalam indikator ketenagakerjaan, pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja namun sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja. Jadi tidak mengejutkan apabila pengangguran menjadi topik yang sering diperbincangkan dalam perdebatan politik oleh para politisi yang seringkali mengkaji bahwa kebijakan yang mereka tawarkan akan membantu terciptanya lapangan pekerjaan (Mankiw, 2000).

Pengangguran adalah masalah makroekonomi yang mempengaruhi manusia secara langsung dan merupakan yang paling berat. Bagi kebanyakan orang, kehilangan pekerjaan berarti penurunan standar kehidupan dan rekanan psikologis.

Menurut Sukirno (2011), pengangguran adalah keadaan tanpa pekerjaan yang dihadapi oleh segolongan tenaga kerja, yang telah berusaha mencari pekerjaan tetapi tidak memperolehnya. Pengangguran (*Unemployment*) merupakan masalah yang selalu hampir ada dalam setiap perekonomian, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Secara umum, pengangguran didefinisikan sebagai ketidakmampuan angkatan kerja (*labor force*) untuk memperoleh pekerjaan sesuai yang mereka butuhkan dan mereka inginkan. Dengan kata lain, pengangguran merujuk pada situasi atau keadaan dimana seseorang menghadapi ketiadaan kesempatan kerja

Ada beberapa teori yang menjelaskan mengenai pengangguran yang terjadi di dunia :

1) Teori Klasik, teori klasik menjelaskan bahwa pengangguran dapat dicegah melalui sisi penawaran dan mekanisme harga di pasar bebas supaya menjamin terciptanya permintaan yang akan menyerap semua penawaran. Menurut pandangan klasik, pengangguran terjadi karena mis-alokasi sumber daya yang bersifat sementara karena kemudian dapat diatasi dengan mekanisme harga (Gilarso, 2004). Jadi, pada teori klasik jika terjadi kelebihan penawaran tenaga kerja maka upah akan turun dan hal tersebut mengakibatkan produksi perusahaan menjadi turun. Hal itu

membuat permintaan tenaga akan terus meningkat karena perusahaan mampu melakukan perluasan produksi akibat keuntungan yang diperoleh dari rendahnya biaya tadi. Peningkatan tenaga kerja selanjutnya mampu menyerap kelebihan tenaga kerja yang ada di pasar, apabila harga relatif stabil (Tohar, 2000).

- 2) Teori Keynes, dalam menanggapi masalah pengangguran teori Keynes mengatakan hal yang berlawanan dengan teori Klasik, menurut teori Keynes sesungguhnya masalah pengangguran terjadi akibat permintaan agregat yang rendah. Sehingga terhambatnya pertumbuhan ekonomi bukan disebabkan oleh rendahnya produksi akan tetapi rendahnya konsumsi. Menurut Keynes, hal ini tidak dapat dilimpahkan ke mekanisme pasar bebas. Ketika tenaga kerja meningkat, upah akan turun hal ini akan merugikan bukan menguntungkan, karena penurunan upah berarti menurunkan daya beli masyarakat terhadap barang-barang. Akhirnya produsen akan mengalami kerugian dan tidak dapat menyerap tenaga kerja.
- 3) Teori Kependudukan dari Malthus, teori Malthus menjelaskan bahwa pertumbuhan penduduk cenderung melampaui pertumbuhan persediaan makanan. Dia mengatakan penduduk cenderung tumbuh secara "deret ukur" sedangkan persediaan makanan cenderung tumbuh secara "deret hitung". Malthus menyimpulkan bahwa sebagian jumlah penduduk akan terjerumus kemiskinan yang dikarenakan pesat nya pertumbuhan penduduk dibandingkan dengan pertumbuhan makanan sehingga para

penduduk akan bersaing satu sama lain untuk mendapatkan makanan dan pekerjaan dimana yang tersisih itu menjadi golongan pengangguran

Untuk mengukur tingkat pengangguran suatu wilayah bisa diperoleh melalui dua pendekatan :

1) Pendekatan Angkatan Kerja (*Labour force approach*). Besar kecilnya tingkat pengangguran dapat dihitung berdasarkan presentase dan perbandingan jumlah antara orang yang menganggur dan jumlah angkatan kerja.

$$Tingkat\ Pengangguran = \frac{Jumlah\ Pengangguran}{Jumlah\ Angkatan\ Kerja} \times 100\%$$

- 2) Pendekatan pemanfaatan tenaga kerja (*Labour utilization approach*).
 - a. Bekerja penuh (*employed*) adalah orang-orang yang bekerja penuh atau jam kerjanya mencapai 35 jam per minggu.
 - Setengah menganggur (underemployed) adalah mereka yang bekerja namun belum dimanfaatkan penuh atau jam kerjanya dalam seminggu kurang dari 35 jam.

2.1.3.2. Jenis-jenis Pengangguran

Berdasarkan penyebabnya pengangguran dapat dibagi empat kelompok (Sukirno, 1994) :

1) Pengangguran Normal atau Friksional, Pengangguran ini terjadi bukan karena tidak dapat memperoleh kerja, tetapi karena sedang mencari kerja lain yang lebih baik. Dalam perekonomian yang berkembang pesat, pengangguran memiliki tingkat yang rendah dan pekerjaan mudah

diperoleh. Sebaliknya pengusaha kesulitan memperoleh pekerja, akibatnya pengusaha menawarkan gaji yang lebih tinggi. Hal ini akan mendorong para pekerja untuk meninggalkan pekerjaanya yang lama dan mencari pekerjaan baru yang lebih tinggi gajinya atau lebih sesuai dengan keahliannya. Dalam proses mencari kerja baru ini untuk sementara para pekerja tersebut tergolong sebagai pengangguran. Mereka inilah yang digolongkan sebagai pengangguran normal.

- 2) Penggangguran Siklikal, pengangguran jenis ini terjadi akibat perekonomian di suatu negara mengalami resesi dan depresi. Kondisi ini pun membuat turunnya permintaan produksi barang atau jasa, sehingga perusahaan terpaksa mengurangi para pekerja.
- 3) Pengangguran Struktural, jenis pengangguran ini terjadi karena perubahan struktur dalam kegiatan perekonomian pada suatu masa. Hal ini terjadi ketika kemunduran ekonomi pada industri atau perusahaan yang disebabkan karena adanya tingginya persaingan usaha. Hal tersebut menyebabkan beberapa pengusaha tersisih, biaya pengeluaran yang terlampau tinggi, kerugian yang dialami oleh perusahaan karena menurunnya kegiatan ekspor, dan munculnya barang kompetitor dari pihak lain. Akibatnya usaha tersebut harus dikurangi atau mungkin ditutup. Dampaknya pekerja akan menganggur. Hal inilah yang dinamakan dengan pengangguran struktural.
- 4) Pengangguran Teknologi, seiring dengan berkembangnya zaman kemajuan dalam bidang teknologi juga semakin canggih. Dampak dari

berkembangnya teknologi ialah dapat mempermudah kehidupan manusia, akses informasi dan transportasi untuk berpergian menjadi sangatlah mudah. Namun di sisi lain maju nya teknologi tersebut dapat membuat peran manusia tersisihkan. Seperti misalnya dengan adanya robot atau kecerdasan buatan atau *Artificial Intilegent (AI)*, pekerjaan yang sebelumnya dilakukan oleh manusia diambil alih oleh mereka. Misalnya adalah penggunaan *AI* untuk membuat sebuah logo sebuah lembaga yang dikarenakan biaya yang dikeluarkan lebih rendah dibanding membayar seorang *graphic designer*, akibatnya masyarakat yang berprofesi sebagai *graphic designer* terancam kehilangan pekerjaanya akibat semakin meluasnya penggunaan *AI* ini. Mereka yang tergantikan oleh teknologi ini disebut pengangguran teknologi

Berdasarkan cirinya, pengangguran dibagi menjadi empat kelompok (Sukirno, 1994):

- Pengangguran terbuka. Pengangguran ini tercipta sebagai akibat pertambahan lowongan pekerjaan yang lebih rendah dari pertambahan tenaga kerja. Sebagai akibatnya dalam perekonomian semakin banyak jumlah tenaga kerja yang tidak dapat memperoleh pekerjaan.
- 2) Pengangguran tersembunyi. Pengangguran ini seringkali muncul di sektor pertanian atau jasa. Setiap kegiatan ekonomi memerlukan tenaga kerja, jumlah tenaga kerja yang digunakan tergantung pada banyak faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan seperti : besar kecilnya perusahaan, jenis kegiatan perusahaan, mesin yang digunakan (apakah

intensif buruh atau intensif modal) dan tingkat produksi yang dicapai. Pada negara berkembang seringkali didapati bahwa jumlah pekerja dalam suatu kegiatan ekonomi adalah lebih banyak dari yang sebenarnya diperlukan supaya ia dapat menjalankan kegiatannya dengan efisien. Kelebihan tenaga kerja yang digunakan digolongkan dalam pengangguran tersembunyi.

- 3) Pengangguran Musiman. Jenis pengangguran ini banyak di temukan di sektor pertanian dan perikanan. Pada musim hujan penyadap karet dan nelayan tidak dapat melakukan pekerjaan mereka dan terpaksa menganggur. Pada musim kemarau pula para petani tidak dapat mengerjakan tanahnya. Disamping itu pada umumnya para petani tidak begitu aktif di antara waktu sesudah menanam dan sesudah menuai. Apabila dalam masa tersebut para penyadap karet, nelayan dan petani tidak melakukan pekerjaan lain maka mereka terpaksa menganggur. Pengangguran seperti ini digolongkan sebagai pengangguran musiman.
- 4) Setengah menganggur. Disebut setengah menganggur dikarenakan jam kerja belum dimanfaatkan penuh atau jam kerjanya dalam seminggu kurang dari 35 jam. Seperti mereka hanya bekerja dalam satu hingga dua hari dalam seminggu, atau hanya satu sampai empat jam sehari. Pekerja yang mempunyai waktu kerja seperti ini digolongkan sebagai setengah menganggur (underemployed).

2.1.3.3. Dampak penganguran

Menurut Sukino (2000), dampak pengangguran di bedakan kedalam dua aspek, dimana dua aspek tersbut adalah :

- 1) Dampak terhadap kegiatan perekonomian. Tingkat pengangguran yang relatif tinggi tidak memungkinkan masyarakat mencapai pertumbuhan ekonomi yang tangguh. Hal ini dapat dengan jelas dilihat dari berbagai akibat buruk yang bersifat ekonomi yang ditimbulkan oleh masalah pengangguran. Akibat-akibat buruk tersebut dapat dibedakan sebagai berikut : a) Tidak maksimalnya tingkat kemakmuran yang mungkin tercapai. b) Berkurangnya pendapatan pajak pemerintah. c) Pengangguran tidak menggalakkan pertumbuhan ekonomi
- 2) Dampak terhadap masyarakat. Pengangguran akan mempengaruhi kehidupan individu dan kestabilan sosial dalam masyarakat. Beberapa keburukan sosial yang diakibatkan oleh pengangguran adalah : a) Pengangguran dapat menyebabkan kehilangan keterampilan. b) ketidakstabilan sosial dan politik

2.1.4. Upah Minimum

2.1.4.1. Definisi Upah Minimum

Upah adalah sesuatu yang diberikan oleh pemberi kerja kepada pekerja atas jasanya dalam memproduksi suatu barang atau jasa didalam suatu kegiatan usaha. Dengan kata lain, upah adalah harga dari tenaga yang dibayar atas jasanya dalam produksi.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) upah diartikan sebagai bayaran yang diberikan sebagai balasan jasa atau ongkos tenaga yang sudah dikerjakan oleh orang lain, hasil sebagai akibat dari pekerjaan. Upah juga merupakan hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang dan sebagai imbalan dari pengusaha kepada pekerja atas suatu pekerjaan yang telah atau akan dilakukan, ditetapkan atau dibayarkan.

Upah minimum adalah suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pekerja di dalam lingkungan usaha atau kerjanya.

Menurut Permen no. 1 Th. 1999 pasal 1 ayat 1, upah minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap. Upah ini berlaku bagi mereka yang lajang dan memiliki pengalaman kerja 0-1 tahun, berfungsi sebagai jaring pengaman, ditetapkan melalui Keputusan Gubernur berdasarkan rekomendasi dari Dewan Pengupahan dan berlaku selama 1 tahun berjalan.

Upah minimum biasanya ditentukan oleh pemerintah, dan ini kadangkadang setiap tahunnya berubah sesuai dengan tujuan ditetapkannya upah minimum itu, yaitu:

- Untuk menonjolkan arti dan peranan tenaga kerja (buruh) sebagai sub sistem dalam suatu hubungan kerja.
- Untuk melindungi kelompok kerja dari adanya sistem pengupahan yang sangat rendah dan secara materiil kurang memuaskan.

- Untuk mendorong kemungkinan diberikannya upah yang sesuai dengan nilai pekerjaan yang dilakukan.
- 4) Untuk mengusahakan terjaminnya ketenangan dan kedamaian kerja dalam perusahaan.
- 5) Mengusahakan adanya dorongan peningkatan dalam standar hidup secara formal.

2.1.4.2. Dasar Hukum Upah Minimum

Jaminan hukum atas upah yang layak tercantum dalam UUD 1945 pasal 28D dan pasal 27 ayat 2 menegaskan bahwa setiap orang berhak mendapatkan upah dan penghidupan bagi kemanusiaan. Juga UU No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, dimana dalam pasal 88 menyebutkan bahwa setiap buruh berhak memperoleh penghasilan yang layak bagi kemanusiaan dan untuk mewujudkannya pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi buruh, diantaranya yaitu upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup layak (KHL), upah lembur, struktur dan skala upah yang proporsional, dan upah untuk pembayaran pesangon.

Penetapan upah minimum di lakukan ditingkat Propinsi, Kabupaten/Kotamadya, dimana Gubernur menetapakan besaran Upah Minimum Propinsi (UMP), atau upah minimum kabupaten/kota (UMK) berdasarkan usualan dari komisi penelitian pengupahan atau jaminan sosial dewan ketenagkerjaan daerah, sekarang Dewan Pengupahan Provinsi atau Kab/Kota) dengan mempertimbangkan; kebutuhan hidup pekerja, indeks harga konsumen, pertumbuhan ekonomi, kondisi pasar kerja dsbnya. Usulan besaran upah

minimum yang disampaikan oleh dewan pengupahan merupakan hasil survey kebutuhan hidup seorang pekerja lajang yang diatur tersendiri dalam peraturan menteri tenaga kerja tentang Komponen kebutuhan hidup pekerja lajang (lihat sub bab sejarah). Dalam ketentuan yang terbaru kebutuhan hidup seorang pekerja lajang diatur dalam PERMENAKERTRANS No, 13 Tahun 2012 tentang komponen dan pentahapan kebutuhan hidup layak, Dalam peraturan ini, pemerintah menetapkan 7 Kelompok dan 60 komponen kebutuhan bagi buruh/pekerja lajang yang menjadi dasar dalam melakukan survey harga dan menentukan besaran nilai upah minimum.

Pasal 26 PP 51/2023 mengatur bahwa upah minimum ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan meliputi variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu. Indeks tertentu (dengan simbol α) adalah variabel baru. Simbol α ini merupakan variabel yang berada dalam rentang nilai 0,10 sampai dengan 0,30. Penentuan nilai simbol α ini dilakukan oleh dewan pengupahan provinsi/kabupaten/kota dengan mempertimbangkan tingkat penyerapan tenaga kerja dan rata-rata atau median upah, serta faktor lain yang relevan terhadap kondisi ketenagakerjaan.

Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum. Bagi pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimum dapat dilakukan penangguhan. Tata cara penangguhan upah minimum diatur dalam KEPMENAKERTRANS Nomor: Kep-231/Men/2003 Tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum. Permohonan penangguhan pelaksanaan upah minimum diajukan oleh pengusaha kepada Gubernur melalui

Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan Provinsi paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum tanggal berlakunya upah minimum.

2.1.4.3. Teori Upah Minimum

Beberapa teori yang perlu diperhatikan yaitu teori yang akan dipergunakan sebagai dasar untuk menetapkan upah. Teori-teori tersebut adalah :

- 1) Teori Upah Normal, oleh David Ricardo. Menurut teori ini, upah ditetapkan dengan berpedoman kepada biaya-biaya yang diperlukan untuk mengongkosi segala keperluan hidup buruh dan tenaga kerja. Teori ini menegaskan kepada buruh, bahwa sejumlah uang yang diterimanya sebagai upah itu adalah sewajarnya demikian, karena memang demikian saja kemampuannya majikan.
- 2) Teori Undang-Undang Upah Besi, oleh Lassale. Menurut teori ini upah normal di atas hanya memenangkan majikan saja, oleh karena itu menurut teori ini buruh harus berusaha menentangnya (menentang teori upah normal itu) agar ia dapat mencapai kesejahteraan hidup.
- Teori Dana Upah, oleh Stuart Mill Senior. Menurut teori dana upah buruh tidak perlu menentang seperti yang disarankan oleh teori Undang-Undang upah besi, karena upah yang diterimanya itu sebenarnya adalah berdasarkan kepada besar kecilnya jumlah dana yang ada pada masyarakat. Jika dana ini jumlahnya besar maka akan pula upah yang diterima meningkat, sebaliknya kalau dana itu berkurang maka jumlah upah yang diterima buruh pun akan berkurang. Menurut teori ini yang akan dipersoalkan sebenarnya bukan seberapa besar upah yang diterima

buruh, melainkan sampai seberapa jauhnya upah tersebut mampu mencukupi segala kerperluan hidup beserta keluarganya. Karena menurut teori ini dianjurkan bahwa khusus untuk menunjang keperluan hidup buruh yang besar tanggungannya disediakan dana khusus oleh majikan atau Negara yang disebut dana anak-anak.

2.1.5. Dependency ratio

2.1.5.1. Definisi Dependency Ratio

Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) merupakan indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang. Semakin tinggi persentase rasio ketergantungan maka akan semakin tinggi beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif terhadap penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan jika persentase *dependency ratio* semakin rendah maka semakin rendah pula beban yang ditanggung penduduk yang produktif terhadap penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Menurut BPS, rasio ketergatungan dapat dihitung melalui rumus:

$$RK = \frac{P_{(0-14)} + P_{(65+)}}{P_{(15-64)}}$$

Dimana:

RK = Rasio Ketergantungan

 P_{0-14} = Jumlah penduduk usia muda (0-14 tahun)

 P_{65+} = Jumlah penduduk usia tua (65 ke atas)

 $P_{(15-64)}$ = Jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun)

2.1.5.2. Teori Dependency Ratio

Menurut Parson, rasio ketergantungan adalah perbandingan antara jumlah penduduk muda atau tua dengan penduduk usia kerja. Rasio ketergantungan di negara berkembang relatif lebih tinggi daripada negara maju karena proporsi anak-anak lebih tinggi. Beban ketergantungan yang lebih besar akan mempengaruhi kapasitas negara-negara berkembang dalam menabung dan menanamkan modal. Maxwell mengatakan rasio ketergantungan merupakan angka yang menunjukkan populasi penduduk dari kegiatan produktif yang dilakukan penduduk usia kerja (usia 15-64 tahun) (Agus, 2016).

Pertumbuhan penduduk usia kerja yang lebih pesat dibanding dengan pertumbuhan penduduk muda memberikan peluang untuk mendapatkan bonus demografi. Hal ini dapat terwujud apabila pemerintah mampu menerapkan kebijakan yang tepat dengan menyediakan lapangan kerja yang cukup untuk meningkatkan produktivitas. Perubahan struktur umur penduduk ini terjadi karena adanya proses transisi demografi secara berkelanjutan dan berjangka panjang. Menurut teori transisi demografi, awalnya tingkat mortalitas menurun karena bidang kesehatan semakin meningkat dan menyebabkan laju pertumbuhan penduduk juga meningkat. Setelah itu semakin lama fertilitas juga ikut menurun, beriringan dengan hal itu penduduk muda memasuki usia produktif dan terjadi pergeseran distribusi umur penduduk sehingga menurunkan rasio ketergantungan.

2.1.6. Penelitian terdahulu

Hasil kesimpulan penelitian terdahulu digunakan untuk memperluas informasi dalam ruang lingkup penelitian. Penelitian terdahulu menjadikan penelitian ini kaya akan kajian ilmiah. Tabel berikut adalah daftar penelitian terdahulu yang penulis gunakan sebagai pertimbangan penulisan

Tabel 2.1 Penelitian terdahulu

No	Peneliti, Tahun dan Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Persamaan Variabel	Perbedaan Variabel	Hasil Penelitian	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Rizki Dita Aprilia (2016): Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, Pendidikan Dan Tingkat Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan (Studi Kasus Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2008- 2013)	Variabel Independen: Pertumbuhan ekonomi. Upah Minimum. Tingkat Penganggura n. Variabel Dependen: Tingkat Kemiskinan.	Upah Minimum Tingkat Penganggura n Tingkat Kemiskinan	Pertumbuhan Ekonomi Pendidikan Dependency Ratio Rata-rata lama sekolah	Upah minimum memberikan pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan Tingkat pengangguran memberi pengaruh positif signifikan terhadap tingkat kemiskinan	Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Volume 4 No. 2 https://jimfeb.ub.ac.id/index.ph p/jimfeb/article/view/3217
2	Padel Aji Pamungkas dan Agus Suman (2016) : Pengaruh Upah Minimum Terhadap Pengangguran Dan Kemiskinan Di Indonesia Tahun 2011- 2016	Variabel Independen: Upah Minimum. Variabel Dependen: Persentase penduduk miskin. Upah Minimum.	Upah Minimum Tingkat Kemiskinan	Tingkat Pengangguran Rata-rata lama sekolah Tingkat penganggura n Dependency ratio	Upah minimum berpengaruh negatif signifikan, meningkatnya upah minimum mampu mengurangi jumlah kemiskinan.	Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya https://jimfeb.ub.ac.id/ index.php/jimfeb/ article/view/4099

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3	Aprilia Putri Wulandari (2019) : Hubungan Antara Dependency Ratio, Disparitas, Dan Aksesibilitas Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Sragen	Variabel Dependency Ratio Disparitas Aksesibilitas Variabel Dependen: Tingkat Kemiskinan.	Dependency Ratio Tingkat Kemiskinan	Disparitas Aksesibilits Rata-rata lama sekolah Upah minimum Tingkat penganggura n	Variabel Dependency ratio memiliki hubungan yang positif namun tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan	https://eprints.ums.ac.id/ 75602/11/np%20aprilia.pdf
4	Rohana, Junaidi dan Purwaka Hari Prihanto (2017) : Analisis Pengaruh Pertumbuhan Penduduk dan Rasio Ketergantungan Terhadap Kemiskinan di Kabupaten Sarolangun	Variabel Independen: Pertumbuhan Penduduk Dependency Ratio. Variabel Dependen: Tingkat Kemiskinan.	Dependency Ratio Tingkat Kemiskinan	Pertumbuhan Penduduk Rata-rata lama sekolah Upah minimum Tingkat penganggura n	Variabel Dependency Ratio mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan dengan	e-Jurnal Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan Vol. 6. No.2, Mei-Agustus 2017 ISSN: 2303- 1220 (online)
5	Ropikatul dkk. (2021): Pengaruh Angka Harapan Hidup, Rata-Rata Lama Sekolah Dan Pengeluaran Perkapita Terhadap Tingkat Kemiskinan Pada Kabupaten /Kota Di Provinsi Jambi	Variabel Independen: Angka Harapan Hidup Rata-rata Lama Sekolah Pengeluaran Perkapita. Variabel Dependen: Tingkat Kemiskinan.	Rata-rata Lama Sekolah Tingkat Kemiskinan	Angka Harapan Hidup Pengeluaran Perkapita. Upah minimum Tingkat penganggura n	variabel ratarata lama sekolah berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kab/Kota di Provinsi Jambi	e-Jurnal Perspektif Ekonomi dan Pembangunan Daerah Vol.10. No.3, September – Desember 2021 ISSN: 2303- 1255
6	Abdul Hadi (2019): Pengaruh Rata- Rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota Terhadap Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2017	Variabel Independen: Rata—rata Lama Sekolah. Variabel Dependen: Tingkat Kemiskinan.	Rata-rata Lama Sekolah Tingkat Kemiskinan	Upah minimum Tingkat penganggura n	Variabel Rata—rata Lama Sekolah memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tiingkat kemiskinan di kabupaten/kot a di Provinsi Jawa Timur	https://journal.trunojoyo.ac.id/mediatrend/article/view/4504/pdf

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7	Stepanie Ayu Pradipta dan Retno Mustika Dewi (2020) : Pengaruh Rata- Rata Lama Sekolah Dan Pengangguran Terbuka Terhadap Kemiskinan	Variabel Independen: Rata—rata Lama Sekolah. Tingkat Penganggura n Terbuka Variabel Dependen: Tingkat Kemiskinan.	Rata—rata Lama Sekolah. Tingkat Penganggura n Terbuka Tingkat Kemiskinan.	Dependency ratio Upah minimum	Variabel Rata-Rata Lama Sekolah berpengaruh positif signifikan Variabel Tingkat Pengangguran Terbuka berpengaruh positif tidak signifikan	Pradipta, S., & Dewi, R. (2020). Pengaruh Rata-Rata Lama Sekolah dan Pengangguran Terbuka Terhadap Kemiskinan. Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE), 8(3), 109- 115. https://doi.org/10.26740/ jupe.v8n3.p109-115
8	Nur Fitriana (2022) : Pengaruh Upah Minimum Regional, Indeks Pembangunan Manusia Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Indonesia	Variabel Independen: Upah Minimum Indeks Pembanguna n Manusia Tingkat Penganggura n Variabel Dependen: Tingkat Kemiskinan.	Upah Minimum Tingkat Kemiskinan.	Indeks Pembanguna n Manusia Tingkat Penganggura n	Upah minimum regional berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kemiskinan	https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/24394/1/Nur%20Fitriana,%20160604007,%20FEBI,%20IE.pdf
9	Ahmad Ridho Rahmani (2021): Pengaruh Gender Ratio, Dependency Ratio, Dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2010- 2017	Variabel Independen: Gender Ratio Dependency Ratio Partipasi Angkatan Kerja Perempuan Variabel Dependen: Tingkat Kemiskinan.	Dependency Ratio Tingkat Kemiskinan.	Gender Ratio Partipasi Angkatan Kerja Perempuan Rata-rata lama sekolah Upah minimum Tingkat penganggura n	Variabel dependency ratio memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi NTB.	https://jimfeb.ub.ac.id/index.ph p/ jimfeb/article/view/7673

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
10	Via Aprilia dan Mike Triani (2022): Analisis Pengaruh Ketimpangan Gender, Rasio Ketergantungan Dan Kesehatan Terhadap Kemiskinan Di Indonesia	Variabel Independen: Ketimpangan Gender Dependency Ratio Kesehatan Variabel Dependen: Tingkat Kemiskinan.	Dependency Ratio Tingkat Kemiskinan.	Ketimpangan Gender Kesehatan Rata-rata lama sekolah Upah minimum Tingkat penganggura n	Variabel Dependency Ratio mempunyai pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia	Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan Volume 4, nomor 3, September 2022, hal 43-50 http://ejournal.unp.ac.id/ students/index.php/epb/index
11	Putri Deswita Sari (2023): Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka Dan Rata-Rata Lama Sekolah Terhadap Tingkat Penduduk Miskin Di Indonesia 2020	Variabel Independen: Rata—rata Lama Sekolah. Tingkat Penganggura n Terbuka Variabel Dependen: Tingkat Kemiskinan.	Rata—rata Lama Sekolah. Tingkat Penganggura n Terbuka Tingkat Kemiskinan.	Upah minimum Dependency ratio	Tidak terdapat pengaruh antara tingkat pengangguran terbuka dan rata-rata lama sekolah terhadap tingkat penduduk miskin di Indonesia tahun 2020	http://download.garuda.kemdik bud.go.id/article.php?article=3 464876&val=30282&title=PE NGARUH%20TINGKAT%20 PENGANGGURAN%20TERB UKA%20DAN%20RATA- RATA%20LAMA%20SEKOL AH%20TERHADAP%20TIN GKAT%20PENDUDUK%20 MISKIN%20DI%20INDONES IA%202020
12	Ida Bagus Eka Artika Dan Ida Ayu Ketut Marini (2022): Pengaruh Beberapa Faktor Utama Terhadap Upaya Penurunan Tingkat Kemiskinan Di Propinsi Nusa Tenggara Barat, Periode 2012 – 2021	Variabel independen: Sektor Pertanian Angka Partisipasi kerja Dependency Ratio Pola konsumsi non pangan Variabel Dependen: Tingkat Kemiskinan.	Dependency Ratio Tingkat Kemiskinan.	Sektor Pertanian Angka Partisipasi kerja Pola konsumsi non pangan Rata-rata lama sekolah Upah minimum Tingkat penganggura n	Dependency ratio berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di NTB	http://journal.unmasmataram.ac .id/index.php/GARA Jurnal Ganec Swara Vol. 16, No.2, September 2022 ISSN 2615-8116 (Online)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
13	Masro Fitri Ana Harahap dan Chenny Seftarita (2021) : Determinan Kemiskinan Ditinjau Dari Variabel Pendidikan Di Provinsi Aceh	Variabel Independen: Rata-Rata Lama Sekolah Harapan Lama Sekolah Variabel Dependen: Tingkat Kemiskinan.	Rata-Rata lama sekolah Tingkat Kemiskinan.	Harapan lama sekolah Upah minimum Tingkat penganggura n Dependency ratio	Rata-rata lama sekolah mempunyai hubungan negatif terhadap tingkat kemiskinan	Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Pembangunan (JIM EKP) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala Vol. 7 No. 7 Mei 2022 : 131- 140 ISSN.2549-8363
14	Toto Mahenra dan Juardi (2024) : Dampak Tingkat Pengangguran, Kesempatan Kerja, Upah Minimum, dan Inflasi terhadap Kemiskinan di Kota Makassar	Variabel Independen: Tingkat Penganggura n Kesempatan Kerja Upah Minimum Inflasi Variabel Dependen: Tingkat Kemiskinan.	Tingkat Pengangguran Upah Minimum Tingkat Kemiskinan.	Kesempatan kerja Inflasi Rata-rata lama sekolah Upah minimum Dependency ratio	Variabel Tingkat pengangguran berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan Variabel upah minimum berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan	Bulletin of Economic Studies (BEST), 4(1), 58-72. https://doi.org/10.24252/best.v 4i1.47533.xxxx
15	Yurdilla Utari Nur Malida dan Agus Sumanto (2024) : Analisis Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan Tahun 2018- 2022	Variabel Independen: Tingkat penganggur- an terbuka Pertumbuhan Ekonomi Variabel Dependen: Tingkat Kemiskinan.	Tingkat penganggur- an terbuka Tingkat Kemiskinan.	Pertumbuhan ekonomi Rata-rata lama sekolah Upah minimum Tingkat penganggura n	Variabel Tingkat pengangguran terbuka berdampak positif terhadap tingkat kemiskinan	EKONOMIKAWAN: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Volume 24, No.1 Juli 2024 P-ISSN: 1693-7600, E-ISSN: 2598-0157 Open Access: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ekawan DOI: 10.30596/ekonomikawan.v%vi%i. 16250

2.2. Kerangka Pemikiran

Penelitian menggunakan variabel dependen tingkat kemiskinan dan variabel independen Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Upah Minimum Kabupaten/Kota dan *Dependency Ratio* (*DR*) sebagai variabel yang di duga berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan.

Ke empat variabel independen tersebut akan di olah dalam proses regresi dengan dengan variabel dependen. Alat analisis regresi yang digunakan adalah *E-views* 10 dengan menggunakan metode data panel yang menggabungkan data *time series* dan *cross-section*.

2.2.1. Hubungan Rata-rata Lama Sekolah dengan Tingkat Kemiskinan

Pendidikan dan tingkat kemiskinan memiliki hubungan yang erat dan kompleks. Di seluruh dunia, pendidikan telah diakui sebagai salah satu faktor kunci dalam mengatasi kemiskinan dan menciptakan kemajuan ekonomi yang berkelanjutan. Berbagai daerah cenderung menunjukan sebuah pola dimana individu dengan akses dan kesempatan pendidikan yang baik cenderung memiliki peluang yang lebih besar untuk menghindari atau keluar dari kemiskinan.

Lincolin (1999) menyatakan bahwa pendidikan (formal dan non-formal) bisa berperan penting dalam mengurangi kemiskinan dalam jangka panjang, baik secara tidak langsung melalui perbaikan produktivitas dan efisiensi secara umum, maupun secara langsung melalui pelatihan golongan miskin dengan keterampilan yang dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas mereka dan pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan mereka.

Pendidikan memiliki peran penting dalam mengurangi kemiskinan baik di Negara Indonesia atau negara manapun dalam jangka panjang. Baik secara tidak langsung melalui perbaikan produktivitas dan efisiensi secara umum, maupun secara langsung melalui pelatihan golongan miskin dengan keterampilan yang dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas mereka dan pada waktunya akan meningkatkan pendapatan mereka (Arsyad, 2010).

Penilitian yang dilakukan oleh Hadi (2019) menunjukan hubungan negatif dimana hasil ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Lincolin (1999) dan diperkuat oleh hasil penelitian Hasanah dkk. (2021) dan Harahap & Chenny Seftarita (2021) yang juga menunjukan hubungan negatif.

Hasil penelitian Pradipta (2020) dan Sari (2023) menunjukan bahwa rata-rata lama sekolah tidak berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan dengan signifikansi yang tidak signifikan, yang mana hasil ini tidak sejalan dengan teori yang telah dikemukakan sebelumnya. Berdasar pada hasil tersebut, penelitian ini dilaksanakan dengan asumsi bahwa rata-rata lama sekolah menjadi salah satu penyebab menurunnya tingkat kemiskinan, sebab meskipun ada hasil penelitian terhadahulu yang menunjukan tidak adanya hubungan negatif antara rata-rata lama sekolah dengan tingkat kemiskinan, signifikansi hasil penelitian tersebut menunjukan data yang tidak signifikan.

2.2.2. Hubungan Upah Minimum Kabupaten/Kota dengan Tingkat Kemiskinan

Upah minimum sering dianggap sebagai salah satu instrumen kebijakan yang efektif dalam mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan pekerja yang berpenghasilan rendah. Pengaturan upah minimum bertujuan untuk menetapkan batas terendah dari pembayaran yang diperbolehkan bagi pekerja dalam suatu negara atau wilayah tertentu.

Kebijakan upah minimum diterapkan atas pertimbangan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama kesejahteran golongan masyarakat miskin. Penerapan kebijakan upah minimum bertujuan untuk mengangkat pendapatan dari pekerja, karena upah yang diterima akan lebih tinggi maka diharapkan rata-rata upah pekerja akan meningkat.

Beberapa ahli berpendapat bahwa upah minimum dapat berperan sebagai alat yang efektif dalam mengurangi tingkat kemiskinan dengan menaikkan pendapatan pekerja yang berpenghasilan rendah. Mereka berargumen bahwa dengan menetapkan standar pembayaran minimum yang layak, upah minimum dapat membantu pekerja untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti makanan, perumahan, dan perawatan kesehatan. Dalam penelitiannya mengenai dampak kenaikan upah minimum terhadap pendapatan pekerja di Amerika Serikat. Dube, dkk. (2010) menemukan bahwa kenaikan upah minimum secara signifikan meningkatkan pendapatan pekerja yang berpenghasilan rendah tanpa mengurangi kesempatan kerja

Melihat pada penelitian terdahulu yang dilaksanakan di Indonesia, penelitian yang dilaksanakan oleh Aprilia dan Pamungkas (2016) menunjukan hubungan negatif yang signifikan. Kemudian diperkuat dengan hasil penelitian Fitriana (2022) dan Mahenra & Juardi (2024) yang juga menampilkan hubungan negatif terhadap tingkat kemiskinan. Sebaliknya, hasil penelitian Sari (2023) menunjukan bahwa tidak ada hubungan antara upah minimum dengan tingkat kemiskinan dengan signifikansi data yang tidak signifikan. Berdasarkan pada hasil tersebut penelitian ini dilaksanakan

dengan asumsi bahwa salah satu penyebab menurunnya tingkat kemiskinan di sebabkan oleh meningkatnya upah minimum

2.2.3. Hubungan Tingkat Pengangguran Terbuka dengan Tingkat Kemiskinan

Pengangguran dan kemiskinan adalah dua masalah yang saling terkait dan memiliki dampak yang mendalam terhadap kehidupan individu dan masyarakat secara luas. Tingkat pengangguran yang tinggi tidak hanya menghambat pertumbuhan ekonomi suatu negara, tetapi juga memberikan tekanan besar pada kehidupan sosial dan kesejahteraan individu

Pengaruh dari pengangguran terhadap kemiskinan menurut Sukirno, (2004) adalah pendapatan masyarakat berkurang karena tidak memiliki pekerjaan yang pada akhirnya mengurangi tingkat kemakmuran yang telah dicapai seseorang. Kesejahteraan masyarakat semakin menurun karena menganggur tentunya akan meningkatkan peluang mereka terjebak dalam kemiskinan karena tidak memiliki pendapatan. Bila pengangguran yang terjadi di suatu negara sangat buruk, hal ini dapat berdampak pada kekacauan politik, sosial, menimbulkan efek yang buruk bagi kesejahteraan masyarakat dan prospek pembangunan ekonomi dalam jangka panjang

Faktor yang mempengaruhi perluasan kesempatan kerja antara lain: perkembangan jumlah penduduk danangkatan kerja, pertumbuhan ekonomi dan kebijaksanaan mengenai perluasan kesempatan kerjaitu sendiri. Tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi yang sangat penting disamping sumber alam, modal dan teknologi. Tenaga kerja mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembangunan, sebagai pelaku pembangunan. Masalah

ketenagakerjaan merupakan masalah yang begitu nyata dan dekat dengan lingkungan,bahkan masalah ketenagakerjaan dapat menimbulkan masalah baru baik di bidang ekonomi maupun non-ekonomi. Tingkat pengangguran yang tinggi menyebabkan rendahnya pendapatan yang selanjutnya memicu munculnya kemiskinan.

Penelitian Pamungkas dan Aprilia (2016) menujukan terdapat hubungan positif antara tingkat pengangguran terbuka dengan tingkat kemiskinan dimana hasil ini sejalan dengan pernyataan sukirno dimana pengangguran akan menyebabkan kemiskinan. Kemudian hal ini di perkuat dengan hasil penelitian Sari (2023), Malida, dan Mahenra (2024) yang juga menunjukan hubungan positif antara tingkat pengangguran terbuka dengan tingkat kemiskinan

Berdasar pada teori dan penelitian terdahulu penelitian tersebut, penelitian ini dilaksanakan dengan asumsi bahwa tingkat pengangguran terbuka menjadi salah satu penyebab meningkatnya tingkat kemiskinan di Priangan Timur.

2.2.4. Hubungan Dependency Ratio dengan Tingkat Kemiskinan

Dependency ratio adalah salah satu indikator demografis yang mengukur perbandingan antara jumlah individu yang tergantung (seperti anak-anak dan lanjut usia) dengan jumlah individu yang bekerja. Hubungan antara rasio ketergantungan dan tingkat kemiskinan menjadi subjek penting dalam kajian ekonomi dan sosial karena memiliki implikasi yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Daerah dengan rasio ketergantungan yang tinggi

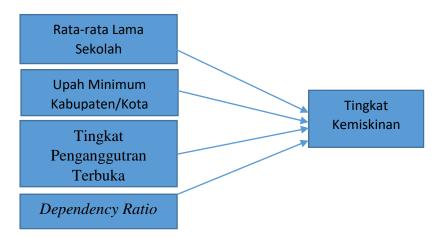
mungkin menghadapi tantangan dalam menyediakan layanan publik yang memadai, seperti pendidikan dan perawatan kesehatan, serta memberikan dukungan sosial bagi individu yang tidak mampu bekerja.

Menurut Arsyad (2010), Tingkat pertumbuhan penduduk yang semakin cepat di negara-negara sedang berkembang menyebabkan proporsi penduduk yang belum dewasa menjadi bertambah tinggi dan jumlah anggota keluarga bertambah besar. Akibatnya angka beban tanggungan (burden of dependency ratio), yaitu perbandingan antara orang-orang yang belum/tidak sanggup bekerja dengan orang-orang yang ada dalam batas umur turut serta dalam proses produksi. dependency ratio yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi, secara tidak langsung dengan tingginya dependency ratio yang terjadi tidak diimbangi dengan persediaan lapangan pekerjaan maka akan berdampak pada kemiskinan disebabkan jumlah penduduk yang tinggi, jumlah angkatan kerja yang setiap tahunnya mengalami peningkatan sehingga beban ketergantungan yang meningkat dikarekan adanya masalah terhadap pembangunan ekonomi yang menimbulkan gap employment dan jumlah kemiskinan.

Penelitian dan Rohana, dkk. (2017) dan Wulandari (2019) menunjukan bahwa *dependency ratio* mempunyai pengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan, sesuai dengan pernyataan Arsyad (2010). Kemudian hal ini diperkuat oleh penelitian yang dilaksanakan oleh Rahmani (2021), Artika dan Aprilia (2022) juga menunjukan hubungan positif antara *dependency ratio*

terhadap tingkat kemiskinan, sehingga penelitian ini dilaksanakan dengan asumsi bahwa dependency ratio menjadi salah satu penyebab tinggi nya tingkat kemiskinan di Priangan Timur.

Berdasarkan pada uraian hubungan antara variabel diatas, penelitian ini di susun dengan kerangka berperkir variabel rata-rata lama sekolah, upah minimum kabupaten/kota, tingkat pengangguran terbuka, dan *dependency ratio* sebagai variabel independen akan mempengaruhi tingkat kemiskinan sebagaimana yang terdapat pada gambar 2.1 dibawah ini:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.3. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara yang diambil untuk menjawab pertanyaan pada rumusan masalah yang diangkat didalam suatu penelitian yang perlu diuji secara empiris yang diperoleh dari hasil penelitian terdahulu, serta didukung oleh data sebagai objek penelitian yang akan di olah dengan menggunakan alat analisis (Sugiyono, 2007). Penelitian ini mengangkat tingkat kemiskinan sebagai permasalahan dengan beberapa variabel yang diduga berpengaruh dengan hipotesis awal sebagai berikut:

- Diduga rata-rata lama sekolah dan upah minimum kabupaten/kota mempunyai pengaruh negatif, sedangkan tingkat pengangguran terbuka dan *dependency ratio* mempunyai pengaruh positif secara parsial terhadap tingkat kemiskinan di wilayah Priangan Timur tahun 2016-2021.
- Diduga rata-rata lama sekolah, upah minimum kabupaten/kota, tingkat pengangguran terbuka dan *dependency ratio* mempunyai pengaruh secara simultan terhadap tingkat kemiskinan di wilayah Priangan Timur tahun 2016-2021